
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2014 dan Capaian Renstra Inspektorat

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2014

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat diukur melalui pencapaian terhadap 7 (tujuh) sasaran utama Inspektorat. Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran utama melalui kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat selama tahun 2014.

- 1) *Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah*, pencapaian kinerja untuk sasaran ini diukur dengan menggunakan 1 (satu) Indikator, yaitu meningkatnya nilai hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional, yang ditargetkan skor 2,750.

Pada saat penyusunan masih dalam proses pemeringkatan dari Kementerian Dalam Negeri, jadi pencapaian IKU untuk indikator ini masih belum bisa dilihat/dinilai keberhasilannya.

- 2) *Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan administrasi umum pemerintahan*, pencapaian kinerja untuk sasaran ini diukur dengan menggunakan Indikator, yaitu presentase penurunan jumlah temuan penyimpangan terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi, yang ditargetkan penurunan sebesar 10%. terhadap capaian IKU yang semula dari 312 temuan menjadi sebesar 206 atau sebesar 35,90% capaian ini masuk ***kategori Baik sekali (BS)***
- 3) *Meningkatnya peran pengawasan intern dalam melakukan pemeriksaan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*, pencapaian

kinerja untuk sasaran kedua ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) Indikator, yaitu:

- Penyelesaian TLHP OPD Provinsi, yang ditargetkan sebesar 80% dengan direalisasikan sebesar 80,96% sehingga capaian kinerja $(80,96/80 \times 100\%) = 101,20\%$ dan masuk *kategori Baik sekali (BS)*.
- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI LKPD Pemprov Jabar, yang ditargetkan sebesar 45% dengan direalisasikan sebesar 61,90% sehingga capaian kinerja $(61,90/45 \times 100\%) = 137,55\%$ dan masuk *kategori Baik sekali (BS)*.
- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) semula Tahun 2010 mendapat WDP sejak Tahun 2011 dan Tahun 2013 menjadi WTP capaian ini masuk *kategori Baik (B)*, sedangkan pada Tahun 2014 pada saat dibuat laporan masih dalam proses pemeriksaan BPK-RI.

Tingkat pencapaian kinerja keseluruhan untuk kedua indikator tersebut di atas, adalah sebesar $101,20 + 137,55 = 238,75 / 2 \times 100\% = 119,37\%$ sehingga capaian kinerja masuk ***kategori Baik sekali (BS)***.

4) *Meningkatnya peran pengawasan dalam pembinaan dan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tingkat OPD* Pencapaian kinerja untuk sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) Indikator, yaitu:

- Persentase peningkatan jumlah OPD atas kualitas nilai evaluasi LAKIP, yang ditargetkan sebesar 35% OPD adalah nilai B, capaian ini melebihi dari target yaitu 36% OPD dengan nilai B sehingga capaian IKU $(36/35 \times 100\%) = 102,86\%$ dan masuk *kategori Baik sekali (BS)*.
- Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemprov Jawa Barat, yang ditargetkan adalah nilai CC, capaian ini sesuai

target sehingga capaian IKU = 100% dan masuk *kategori Baik (B)*.

Tingkat pencapaian kinerja keseluruhan untuk kedua indikator tersebut di atas, adalah sebesar $102,86 + 100 = 202,86 / 2 \times 100\% = 101,43\%$ sehingga capaian kinerja **Kategori Baik sekali (BS)**.

- 5) *Meningkatnya pembinaan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah*, pencapaian kinerja untuk sasaran ini diukur dengan menggunakan 1 (satu) Indikator, yaitu persentase jumlah OPD yang melaksanakan SPIP, yang ditargetkan sebanyak 10% dengan direalisasikan sebesar 10,71% sehingga capaian IKU $(10,71/10 \times 100\%) = 107,10\%$ dan masuk **kategori Baik sekali (BS)**.
- 6) *Meningkatnya nilai kualitas pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat*, pencapaian kinerja untuk sasaran kedua ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) Indikator, yaitu:
 - Persentase/meningkatnya kualitas nilai indikator RAD-PPK, yang ditargetkan adalah nilai 100% dengan Indikator hijau, capaian ini sesuai target sehingga capaian IKU = 100% dan masuk *kategori Baik (B)*.
 - Persentase penyelesaian TLHP penanganan pengaduan masyarakat, yang ditargetkan sebanyak 65% dengan direalisasikan sebesar 80% sehingga capaian kinerja sebesar $80/65 \times 100\% = 123,07\%$ dan masuk *kategori Baik sekali (BS)*.

Tingkat pencapaian kinerja keseluruhan untuk kedua indikator tersebut di atas, adalah sebesar $100 + 123,07 = 223,07 / 2 \times 100\% = 111,85$ sehingga capaian kinerja **Kategori Baik sekali (BS)**.

7) *Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal, pencapaian kinerja untuk sasaran kedua ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) Indikator, yaitu:*

- Jumlah auditor dan P2UPD bersertifikat, yang ditargetkan sebesar 70 orang dari jumlah pejabat fungsional yang bersertifikat, capaian ini kurang dari target yaitu hanya sebanyak 68 orang, hal ini disebabkan 2 orang telah meninggal dunia sehingga capaiannya sebesar 97,14 % dan masuk *kategori Baik (B)*.
- Jumlah auditor berkualifikasi Pengendali Teknis, yang ditargetkan sebanyak 10 orang dari jumlah pejabat fungsional yang ada pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai pengendali teknis, realisasi capaian ini melebihi dari target yaitu 14 orang pejabat pengendali teknis atau sebesar 140% dan masuk *kategori Baik sekali (BS)*.
- Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat, yang ditargetkan adalah level II dengan Indikator hijau, capaian ini sesuai target sehingga capaian IKU = 100% dan masuk *kategori Baik (B)*.

Tingkat pencapaian kinerja keseluruhan untuk ketiga indikator tersebut di atas, adalah sebesar $97,14 + 140 + 100 = 337,14/3 \times 100\% = 112,38\%$ sehingga capaian kinerja ***Kategori Baik Sekali (BS)***.

Capaian Renstra Inspektorat sampai dengan tahun 2014 bisa dilihat melalui Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2013				TAHUN 2014			
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	FISIK %	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	FISIK %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Belanja Tidak Langsung	15.192.029.715,00	14.848.351.768,00	97,74	100	15.749.805.334,00	14.987.429.360,00	95,16	100
2	Belanja Langsung	19.927.235.306,00	19.368.128.315,00	97,19	100	21.494.269.000,00	20.861.442.602,00	97,06	100
						37.244.074.334,00	35.848.871.962,00	96,25	100
A	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan :								
1.	Pelaksana Pemeriksaan dan Evaluasi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.	9.093.990.949,00	9.073.358.895,00	99,77	100	12.020.210.000,00	12.018.322.500,00	99,98	
2.	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat.	1.021.195.000,00	949.965.000,00	92,02	100	517.400.000,00	513.460.000,00	99,24	
3.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Kebijakan Pengawasan dan Rencana Kerja Pengawasan.	516.700.000,00	475.081.899,00	91,96	100	644.100.000,00	634.350.000,00	98,49	
4.	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri, Itjen Kementerian Lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.	688.716.651,00	657.005.425,00	95,40	100	778.865.000,00	640.064.292,00	82,18	
5.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Pemerintah Kabupaten/Kota.	834.000.000,00	751.641.000,00	90,12	100	675.000.000,00	615.393.000,00	91,17	
6.	Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan	363.087.999,00	343.153.799,00	94,51	100	250.000.000	228.424.000,00	91,37	
B.	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, yang meliputi pelaksanaan kegiatan :								
7.	Desk Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat	199.247.500,00	148.550.250,00	74,56	100	89.700.000,00	54.570.000,00	60,84	
8.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Rencana Aksi Daerah Pemberantas Korupsi (RAD-PK) Provinsi Jawa Barat	386.910.000,00	384.490.000,00	99,37	100	240.674.000,00	232.424.000,00	96,57	
9.	Persiapan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	75.000.000,00	73.392.500,00	97,86	100	200.000.000,00	138.626.000,00	69,31	
C.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang meliputi pelaksanaan Kegiatan :								
10.	Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawasan.	368.020.614,00	343.540.714,00	93,36	100	304.505.000,00	276.346.850,00	90,75	
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi pelaksanaan kegiatan :								
11.	Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat.	827.320.000,00	757.521.243,00	91,56	100	764.025.000,00	588.544.039,00	77,03	
E	Program Administrasi Perkantoran								
12.	Penyelenggaraan Administrasi	1.861.999.700,00	1.761.581.748,00	94,61	100	1.985.490.000,00	1.967.660.177,00	99,10	

	Perkantoran								
F.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
13.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	982.508.906,00	979.430.300,00	99,69	100	1.102.000.000,00	1.092.377.340,00	99,13	
G.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur								
14.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	2.663.538.087,00	2.630.941.162,00	98,78	100	1.877.300.000,00	1.817.647.984,00	96,82	
H.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
15.	Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.	45.000.000,00	38.474.300,00	85,50	100	45.000.000,00	43.232.420,00	96,07	

Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

INDIKATOR KINERJA UTAMA	EKSISTING 2013	2014		2015		2016		2017		2018	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1) Meningkatnya nilai hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional	2,6934	2,750	-	2,950		3,000		3,150		3,250	
2) Presentase penurunan jumlah temuan penyimpangan terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi	312	10%	35,90%	10%		10%		10%		10%	
3) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI LKPD Pemprov Jabar	32,20%	45%	61,90%	50%		60%		70%		70%	
4) Penyelesaian TLHP OPD Provinsi	75%	80%	80,90%	85%		90%		95%		100%	
5) Opini WTP terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
6) Persentase peningkatan jumlah OPD atas kualitas nilai evaluasi LAKIP	20%	35	37,5%	50		80		90		90	
7) Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LAKIP Pemprov Jawa Barat	CC	CC	CC	B		B		B		B	
8) Persentase jumlah OPD yang melaksanakan SPIP	0	10%	10,71%	50%		75%		100%		100%	
9) Persentase/meningkatnya kualitas nilai indikator RAD-PPK	100 (Hijau)	100 (Hijau)	100 (Hijau)	100 (Hijau)		100 (Hijau)		100 (Hijau)		100 (Hijau)	
10) Persentase penyelesaian TLHP penanganan pengaduan masyarakat	60%	65%	80%	70%		75%		75%		75%	
11) Jumlah auditor dan P2UP bersertifikat	65 ORANG	70 orang	68 orang	80 orang		93 orang		93 orang		93 orang	
12) Jumlah auditor berkualifikasi Pengendali Teknis	4	10 orang	14 orang	15		20		25		30	
13) Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat	I	II	II	II		II		III		III	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat merupakan Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari Indikator pencapaian sasaran dari Inspektorat. Tujuan utama (strategis) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pencapaian tujuan:

- 1) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

- 2) Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;
- 3) Meningkatnya mutu dan akuntabilitas kinerja OPD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 4) Meningkatnya sistem pengendalian intern, transparansi, dan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Inspektorat menyadari bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel akan sulit meningkat seperti yang menjadi tujuan Inspektorat apabila Inspektorat selaku pengawas dan pembina yang seharusnya menjadi panutan tidak mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sendiri. Berdasar hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok Inspektorat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, telah diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi

Isu strategis terkait tupoksi yang terjadi di Inspektorat adalah adanya pertentangan peraturan perundangan dari pusat, yaitu antara Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di sini terdapat perbedaan yang mendasar terkait lingkup kewenangan Inspektorat Provinsi terhadap pembinaan dan pengawasan di daerah (kabupaten/Kota).

Isu strategis lain adalah, masih terdapat kesenjangan *knowledge* yang lebar antar pejabat fungsional yang berimplikasi

pada perbedaan kualitas pemeriksaan selain itu aparatur di kesekretariatan di dalam Inspektorat belum semua aparaturnya mampu melaksanakan uraian tugas pokok yang menjadi kewajibannya yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Untuk itu perlu ditingkatkan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat sendiri.

Hampir setiap tahun muncul peraturan perundangan dari Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pengawasan dan harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata dari Inspektorat. Pada tahun 2008, Inspektorat mulai melaksanakan *reviu* terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat setelah efektifnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Selanjutnya pada tahun 2009, Inspektorat mulai melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang *Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Dan sejak tahun 2010, Inspektorat disibukkan memfasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengawasi Pemerintah Provinsi dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI. Hal tersebut membuat beban tugas Inspektorat semakin banyak dan over loaded yang berdampak pada kegiatan pengawasan kurang fokus dan hasilnya tidak optimal.

Pada tahun 2014 terdapat beberapa kebijakan Pemprov Jawa Barat (produk hukum) yang saling berbenturan dan tidak sejalan dengan Peraturan Perundangan dari Pemerintah terutama yang

berkaitan dengan pemeriksaan bantuan keuangan ke pemerintah kabupaten/kota, yang berakibat terhadap dilakukannya perubahan terhadap kebijakan tersebut. Ke depan hal seperti ini perlu dieliminir karena bisa berakibat berkurangnya legitimasi pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat dan kewibawaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di mata pemerintah kabupaten/kota dengan melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi produk-produk hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Inspektorat.

Selanjutnya permasalahan utama dalam pelaksanaan tupoksi Inspektorat adalah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat yang persentasenya sangat rendah, hal ini disebabkan rendahnya tanggungjawab auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan Inspektorat, dan terbatasnya waktu, kualitas dan kuantitas SDM yang menangani kegiatan pemutakhiran data tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan manajemen pengelolaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemutakhiran.

b. Aspek Keuangan

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan tingkat pertumbuhan yang cukup baik. APBD Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 senantiasa meningkat setiap tahunnya, namun meningkatnya anggaran tersebut disertai dampak makin berkembangnya kompleksitas tugas dan permasalahan, serta meningkatnya pula berbagai tuntutan masyarakat. Pada akhirnya penyerapan anggaran atau pencapaian output program/kegiatan menjadi prioritas utama dan mengabaikan pencapaian sasaran utama dan *aspek ketaatan* pada perundang-undangan.

Meskipun APBD Provinsi Jawa Barat setiap tahun mengalami pertumbuhan bukan berarti anggaran pengawasan juga ikut

meningkat. Inspektorat tidak setiap tahun mendapat alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2014 Inspektorat pada beberapa kegiatan tidak mendapat dukungan anggaran yang memadai bahkan tidak ada anggaran sama sekali, hal ini yang mengakibatkan dukungan terhadap tugas pengawasan dan pembinaan kurang memadai yang berdampak pada tidak maksimalnya pencapaian sasaran Inspektorat. Tetapi Inspektorat menyadari dan tidak menuntut lebih, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian terhadap kebijakan keuangan mengenai Insentif Berbasis Kinerja (IBK) yang mulai diterapkan dan adanya prioritas pendanaan untuk pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2014, persentase biaya perjalanan dinas Inspektorat menurut Tim Penyusun Anggaran Daerah (TAPD) sangat besar, persentase biaya perjalanan dinas Inspektorat yang dinilai besar dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- 1) Fokus tugas utama Inspektorat adalah pemeriksaan, monitoring, *reviu* dan evaluasi yang membutuhkan banyak SDM dan mobilitas tinggi, bukan OPD yang menghasilkan *output* berupa fisik sarana/prasarana;
- 2) Dampak dari kebijakan keuangan yang meniadakan honorarium buat PNS, menyebabkan persentase perjalanan dinas menjadi tinggi;
- 3) Pada tahun 2014 Inspektorat mengalami penurunan anggaran *fixed cost* dan tidak adanya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana, hal ini juga menyebabkan persentase perjalanan dinas menjadi tinggi.

Beberapa langkah antisipasi mulai dilakukan Inspektorat, mulai dari pengetatan lama waktu pemeriksaan/monitoring/evaluasi, pengurangan jumlah personil pelaksana pemeriksaan/monitoring/evaluasi dan menghilangkan kegiatan perjalanan dinas yang dianggap bisa dihilangkan.

Dalam pelaksanaan *reviu* Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi, kompetensi Inspektorat masih terbatas karena kurangnya tenaga auditor yang memiliki disiplin ilmu akuntansi.

Berkaitan dengan penyebab keterlambatan pelaporan dan pencapaian kinerja sasaran adalah permasalahan perubahan anggaran dan penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang sangat terlambat. Keterlambatan proses perubahan anggaran tersebut dikarenakan proses perencanaan perubahan anggaran belanja daerah belum sinergis, masih sering terjadi pada DPA perubahan yang diserahkan ke OPD.

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Permasalahan aspek SDM di Inspektorat adalah terbatasnya jumlah auditor/pemeriksa, hal ini meskipun mendapat tambahan pegawai dari Pemerintah Provinsi melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru, hal ini belum memecahkan permasalahan yang ada karena tenaga baru tersebut belum bisa difungsikan langsung untuk menjadi auditor/pemeriksa. Inspektorat auditor/pemeriksa baru yang siap pakai mengingat beban pengawasan yang sudah *over loaded* dari tahun ke tahun.

Sedang permasalahan utama dalam aspek SDM yang dihadapi Inspektorat berkaitan pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan adalah belum semua auditor/pemeriksa yang punya kemampuan memadai untuk mengemban tugas tersebut. Permasalahan ini menjadi kendala utama dalam pencapaian tujuan "*Melalui Pengawasan Berwawasan Pembinaan Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah Jawa Barat Tahun 2013*"

Titik berat kelemahan dalam masalah kepegawaian Pemerintah Provinsi berkaitan dengan permasalahan tentang penyimpangan prosedur pembinaan kepegawaian dan penataan administrasi kepegawaian seperti adanya pejabat struktural yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM). Kelemahan

yang lain adalah: sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja; sistem dan aparatur negara belum efisien, efektif dan berperilaku hemat; terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktivitas; serta praktek penyimpangan yang mengarah penyalahgunaan wewenang (korupsi) belum teratasi.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Permasalahan langsung Inspektorat dalam aspek sarana dan prasarana adalah belum adanya kendaraan operasional tugas pengawasan, meskipun tidak berpengaruh langsung dengan pencapaian sasaran Inspektorat tetapi lebih dalam rangka meningkatkan mobilitas dan kredibilitas auditor/pemeriksa sewaktu melakukan pemeriksaan di luar kota Bandung. Auditor/pemeriksa tidak akan menggunakan fasilitas auditan sewaktu melakukan uji petik atau monitoring ke suatu lokasi, sehingga tidak memberatkan auditan dan bisa lebih independen. Alat penunjang lain untuk kegiatan pengawasan di lapangan yang dirasa masih belum memadai adalah: *cordrill*, *global positioning system (GPS)*, alat ukur digital, dan lain-lain.

Di perkantoran Inspektorat sarana dan prasarana pengawasan yang ada saat ini yang masih berfungsi jumlahnya terbatas, misal komputer, printer, *sound system*, alat presentasi/*infocus*, meja kursi, dan lain-lain, hal ini sangat berpengaruh terhadap dukungan pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan terutama administrasi perkantoran.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis pengawasan dan pembinaan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak

jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu strategis Inspektorat Provinsi Jawa Barat ditetapkan melalui proses sebagai berikut:

- a. Mengadopsi hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Konferensi Nasional APIP Tahun 2014 yang diadakan di Bandung;
- b. Penggabungan dan pengkajian hasil FGD dengan permasalahan pengawasan dan pembinaan di Provinsi Jawa Barat.

Dari proses tersebut ditetapkan isu strategis pengawasan dan pembinaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- a. Inspektorat belum bisa memenuhi peran umum selaku penjamin mutu dan konsultan pada area kebijakan tata kelola, resiko dan pengendalian (*governance, risk and control*) bagi pimpinan dan pemerintahan provinsi;
- b. Mempertahankan opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- c. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih jauh dari harapan;
- d. Masih lemahnya pengendalian internal (wasnal) pada OPD dan perlunya peningkatan pelayanan pengawasan masyarakat (wasmas);
- e. Pengadaan barang dan jasa pemerintah masih rawan tindak pidana korupsi;
- f. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat saat ini masih belum bisa mewadahi tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang semakin kompleks;
- g. Beban kinerja Inspektorat yang semakin banyak dan pengendalian mutu pengawasan yang semakin dilupakan;
- h. *Skill, knowledge* dan *attitude* pemeriksa masih belum merata dan memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan berwawasan pembinaan;

- i. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan.

2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal rencana kerja tahun 2016 di dalam RKPD dibuat berdasarkan Renstra Inspektorat Tahun 2013-2018, di mana semua uraian dan indikatornya masih bersifat indikatif dan berdasar kebijakan pimpinan yang berlaku pada saat itu.

Meskipun secara umum Program/Kegiatan dalam Renja Inspektorat Tahun 2016 setelah dilakukan analisis kebutuhan tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetapi masih terdapat beberapa perubahan pada sub kegiatan yang disebabkan adanya instruksi dari pimpinan. Perubahan tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan pada indikator keluaran dan pagu indikatif yang diajukan.

Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Desk Akuntabilitas, Inspektorat atau Unit Layanan Konsultasi (ULK) pada tahun 2016 mengemban sebuah kegiatan unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu menyediakan layanan pengaduan masyarakat dan desk akuntabilitas secara online tahun 2016, sehingga ditambahkan keluaran berupa peralatan/jaringan pengaduan masyarakat yang bisa berupa hardware ataupun software berdasar kajian lebih lanjut.
- b. Upaya meningkatkan kapabilitas Inspektorat menuju level III membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk itu perlu ketersediaan dana untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sejak dari awal perencanaan di Inspektorat disusun dengan pendekatan **Top Down** dan **Teknokratis**, jadi baik Rencana Strategis

(Renstra) maupun Renja Inspektorat tidak memuat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Provinsi.